

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tandi, F. M. (2026). Ketimpangan Gender dan Human Security dalam Ancaman Keamanan TKW Indonesia di Arab Saudi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1769-1779. <https://doi.org/10.63822/05kwv017>

PENDAHULUAN

Dunia global yang makin berkembang menciptakan kemudahan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena global terus berkembang dalam hubungan internasional. Diera saat ini kebutuhan terhadap tenaga kerja sangat meningkat, khususnya kebutuhan dari negara berkembang dan berpenghasilan tinggi seperti Arab Saudi yang mempekerjakan banyak pekerja perempuan. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim terbanyak tenaga kerja perempuan, yang sangat banyak dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.

Berbagai faktor yang mendorong para perempuan Indonesia menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Utamanya faktor ekonomi yang mendorong berbagai tenaga kerja perempuan Indonesia melakukan migrasi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan karena keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kemiskinan mendorong para pekerja perempuan bermigrasi ke Arab Saudi untuk bekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja perempuan tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak merata.

Arab Saudi merupakan negara berkembang dengan penghasil yang cukup tinggi sehingga seringkali dianggap memberikan peluang ekonomi yang lebih baik. Namun, kenyataannya sering kali tidak semudah itu, banyak tenaga kerja perempuan Indonesia mengalami berbagai kekerasan dan ancaman keamanan. Banyak dari tenaga kerja perempuan Indonesia yang menjadi pekerja rumah tangga yang tingkat kerentanannya sangat tinggi karena pekerjaan dilakukan di ruang privat yang minim pengawasan. Jurnal penelitian Universitas Esa Unggul menyebutkan bahwa “pekerja rumah tangga merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan karena bekerja di ranah domestik yang tertutup.” Kondisi inilah yang menyebabkan tenaga kerja perempuan migran sangat rentan terhadap kekerasan fisik, eksploitasi, diskriminasi, pelecehan seksual, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Pada dinamika hubungan internasional perspektif feminisme sangat diperlukan dalam menganalisis permasalahan terhadap para tenaga kerja perempuan migran. Feminisme memandang bahwa perempuan sering kali berada pada posisi struktur paling bawah dalam sistem global. Ketimpangan gender mengakibatkan banyak pekerja migran perempuan lebih rentan mengalami eksploitasi dibanding laki-laki. Hal ini didasari adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara majikan dan tenaga kerja perempuan. Selain itu budaya patriarki yang sangat kuat membuat perempuan dipandang menjadi seorang yang lemah dan penurut. Para pekerja perempuan seringkali dianggap sebagai tenaga kerja murah, lemah, dan mudah dikontrol sehingga sangat rentan mengalami diskriminasi, kekerasan fisik, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Citra Inferior terhadap tenaga kerja perempuan Indonesia sangat dipengaruhi oleh media. Dalam penelitian *Citra Inferioritas Tenaga Kerja Perempuan (TKW) Indonesia di Saluran Berita Sabq.Org Saudi Arabia* dijelaskan bahwa tenaga kerja perempuan Indonesia sering digambarkan sebagai kelompok lemah, tidak berpendidikan, dan identik dengan masalah sosial. Representasi dari media tersebutlah sangat mengambil peran besar dalam memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan migran Indonesia di Arab Saudi. Pemberitaan yang dilakukan mengarah terhadap sisi negatif pekerja perempuan migran yang akhirnya mempengaruhi cara masyarakat memandang tenaga kerja perempuan Indonesia. Citra negatif tersebutlah yang menjadikan para pekerja perempuan migran sering diperlakukan secara diskriminatif dan dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih rendah di tempat kerja. Media secara tidak langsung membentuk opini publik, memperkuat Ketimpangan gender terhadap pekerja migran perempuan.

Ketimpangan Gender dan Human Security dalam Ancaman Keamanan TKW Indonesia di Arab Saudi

(Tandi.)

Akibatnya, pekerja migran perempuan Indonesia menghadapi tidak hanya ancaman fisik dan ekonomi tetapi juga tekanan sosial dan psikologis karena stigma negatif yang ada di dalam masyarakat.

Tidak hanya ancaman sosial dan ekonomi, ancaman hukum dan politik juga dihadapi pekerja migran perempuan. Menurut penelitian terhadap sistem hukum, Arab Saudi merupakan negara yang lemah perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menyebabkan banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak diselesaikan secara adil. Selain hukum yang lemah hal ini diperparah dengan terbatasnya akses pekerja terhadap bantuan hukum maupun perlindungan sosial. Akibatnya, banyak tenaga kerja perempuan mengalami tekanan psikologis, eksploitasi ekonomi, hingga ancaman terhadap keselamatan individu mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap pekerja migran perempuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara ketimpangan gender dan *human security* yang dihadapi oleh tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi. Penelitian ini penting karena isu pekerja migran perempuan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia, keamanan individu, dan peran negara dalam hubungan internasional. Penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana sistem sosial, budaya patriarki, dan relasi kekuasaan di tempat kerja internasional meningkatkan kerentanan pekerja migran perempuan. Melalui perspektif feminisme dan konsep keamanan manusia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ancaman keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan perlindungan bagi pekerja migran perempuan Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini berfokus pada analisis fenomena sosial dalam studi Hubungan Internasional, yang utamanya membahas mengenai ketimpangan gender dan *human security* terhadap tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi. Oleh karena itu, metode kualitatif dipilih untuk menganalisa dan memahami secara mendalam mengenai pengalaman, kerentanan, dan ancaman keamanan yang dialami pekerja migran perempuan dalam sistem kerja internasional. Selain menyajikan data statistik maupun angka kuantitatif, penelitian ini juga akan memberikan sejumlah analisis terkait fenomena sosial, hubungan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran perempuan.

Dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan para tenaga kerja perempuan dalam sistem migrasi internasional serta menjelaskan kondisi tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi digunakan pendekatan deskriptif analitis. Penulis melalui penelitian ini berupaya agar dapat menggambarkan bagaimana ketimpangan gender, budaya patriarki, diskriminasi sosial, dan relasi kuasa yang tidak seimbang memperbesar ancaman keamanan terhadap pekerja migran perempuan. Dalam penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana konsep *human security* menjadi pendekatan yang relevan dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional yang dialami tenaga kerja perempuan Indonesia.

Kajian dalam studi Hubungan Internasional untuk penelitian ini akan menggunakan perspektif feminisme dan konsep *human security* sebagai kerangka analisis utama. Perspektif feminisme dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat bagaimana perempuan sering ditempatkan pada posisi

subordinat dalam sistem global. Dalam hubungan internasional, feminisme menekankan bahwa perempuan sering mengalami marginalisasi dalam sistem ekonomi dan politik internasional, termasuk dalam sektor migrasi tenaga kerja. Sementara itu, konsep *human security* hadir untuk menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan negara dan ancaman militer, tetapi juga perlindungan individu dari ancaman fisik, ekonomi, sosial, politik, dan psikologis.

Pengumpulan data untuk melengkapi penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, prosiding seminar, laporan penelitian, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi. Sumber-sumber tersebutlah yang membantu dalam memahami bagaimana ketimpangan gender, eksploitasi tenaga kerja, dan ancaman keamanan bagi pekerja migran perempuan berkorelasi dalam konteks hubungan internasional.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan perspektif feminisme dan konsep *human security* dengan kasus tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi. Selain itu, analisis penelitian menunjukkan bagaimana peran negara, media, dan sistem kerja global memengaruhi kondisi pekerja migran Perempuan serta diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dalam studi hubungan internasional.

PEMBAHASAN

Kemudahan Migrasi Pekerja di Era Globalisasi

Globalisasi telah menjadikan dunia yang sangat modern serta memberikan perubahan besar dinamika hubungan internasional, termasuk dalam proses migrasi tenaga kerja antarnegara. Perpindahan tenaga kerja menjadi lebih mudah melalui perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang semakin maju. Mobilitas migran, barang, dan jasa meningkat dengan cepat karena batas negara semakin terbuka di era globalisasi. Kondisi ini meningkatkan jumlah migran internasional, termasuk perempuan Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

Globalisasi ekonomi memberikan dampak yang begitu besar, salah satunya migrasi tenaga kerja internasional. Indonesia menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja baik dalam sektor domestik maupun jasa bagi negara yang membutuhkan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, globalisasi ekonomi menciptakan arus migrasi tenaga kerja yang semakin meningkat akibat adanya kebutuhan tenaga kerja murah di negara tujuan. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling banyak terlibat dalam migrasi tenaga kerja domestik karena dianggap cocok bekerja di sektor rumah tangga (Sulistiyo & Wahyuni, 2012)

Akses informasi yang semakin mudah diakses melalui sosial media dan internet juga memengaruhi faktor meningkatnya migrasi pekerja perempuan. Banyak dari mereka tertarik menjadi pekerja migran karena informasi tentang lowongan kerja di luar negeri diperoleh sangat cepat. Keberadaan agen penyalur juga terus meningkat membantu dalam mempermudah proses perekrutan dan keberangkatan pekerja migran ke negara tujuan. Penelitian mengenai pekerja migran Indonesia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah secara signifikan memengaruhi peningkatan mobilitas tenaga kerja di seluruh dunia. Situasi ini menunjukkan bahwa globalisasi bukan hanya tentang ekonomi dan perdagangan; tetapi juga menyangkut mobilitas tenaga kerja antar negara.

Jika melihat dalam konteks Hubungan Internasional, ada ketergantungan antarnegara dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Arab Saudi sebagai negara tujuan yang membutuhkan banyak pekerja dalam sektor domestik sementara Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak tenaga kerja yang mencari peluang ekonomi di luar negeri. Hubungan tersebut menciptakan pola migrasi internasional yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Namun, dibalik kemudahan itulah migrasi tenaga kerja di era globalisasi turut menimbulkan berbagai permasalahan baru, khususnya bagi pekerja migran perempuan. Banyak pekerja yang minim akan pengetahuan akan batas-batas hukum dan hak-hak pekerja di negara tujuan namun tetap berangkat. Oleh karena itu, pekerja migran perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut sebuah penelitian *Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi*, menjelaskan jika pekerja rumah tangga migran menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi karena mereka bekerja di lingkungan tertutup rumah mereka dengan sedikit pengawasan. Lebih lanjut, penelitian tersebut menunjukkan bahwa korban mengalami tekanan psikologis sebagai akibat dari kekerasan yang mereka alami saat bekerja di Arab Saudi (Hamdi, 2021).

Meningkatnya feminisasi migrasi tenaga kerja juga sangat dipengaruhi oleh globalisasi, yang terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan dalam migrasi internasional. Perempuan migran umumnya bekerja pada sektor domestik yang memiliki tingkat perlindungan hukum lebih rendah dibandingkan sektor formal lainnya. Dalam praktiknya, pekerja migran perempuan sering ditempatkan pada pekerjaan rumah tangga dan perawatan (*care work*) yang rentan terhadap eksploitasi akibat relasi kuasa yang tidak seimbang antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian Dewi dan Kosandi menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan di Arab Saudi, khususnya melalui mekanisme *kafala*, menempatkan pekerja migran perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi dibandingkan kelompok pekerja lainnya (Kusuma Dewi & Kosandi, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya meningkatkan mobilitas tenaga kerja perempuan, tetapi juga memperluas berbagai bentuk kerentanan dalam sistem kerja internasional.

Melalui kemudahan migrasi tenaga kerja di era globalisasi membuka peluang besar bagi Perempuan Indonesia untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri, namun di sisi lain ada juga ancaman keamanan dan kerentanan baru bagi pekerja migran Perempuan. Globalisasi dalam fenomena tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya berdampak positif, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam sistem kerja internasional yang memengaruhi keselamatan dan perlindungan pekerja migran perempuan.

Faktor Ekonomi di Indonesia sebagai Faktor Pendorong Migrasi

Ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi para pekerja perempuan Indonesia, khususnya di Arab Saudi. Indonesia terus dihadapkan pada permasalahan lapangan pekerjaan dan menjadi negara dengan angka pengangguran tertinggi di ASEAN. Berdasarkan berita Tempo – “Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN 2025” dijelaskan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN pada tahun 2025. Tingkat pengangguran Indonesia mencapai 4,76 persen atau sekitar 7 juta pengangguran. Kondisi ini menjadikan jika tidak semua angkatan kerja dapat terserap dalam pasar kerja nasional.

Dalam konteks hubungan internasional, migrasi tenaga kerja dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling penting adalah perbedaan ekonomi global antara negara berkembang dan negara maju atau negara dengan tingkat pendapatan lebih tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang harus menghadapi berbagai permasalahan ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja bagi perempuan di daerah sangat terbatas sehingga banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja di luar negeri agar mendapat penghasilan yang lebih besar. Berdasarkan penelitian *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perempuan Menjadi Pekerja Migran dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar*, faktor pendapatan dan kesempatan kerja memiliki pengaruh besar terhadap keputusan perempuan menjadi pekerja migran. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa “pendapatan dan peluang kerja memengaruhi keputusan perempuan menjadi pekerja migran”

Banyak perempuan Indonesia yang merasa penghasilan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dikarenakan rendahnya tingkat upah di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, faktor lain yang mendorong perempuan untuk memilih menjadi pekerja migran adalah keterbatasan lapangan kerja formal. Di daerah pedesaan, perempuan seringkali hanya memiliki pekerjaan di sektor informal dengan pendapatan rendah. Dalam penelitian *Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia* dijelaskan bahwa desa-desa pengirim pekerja migran umumnya memiliki keterbatasan peluang ekonomi sehingga masyarakat memilih bekerja di luar negeri demi meningkatkan taraf hidup keluarga (Zulfan Fikriansyah & Aan Julia, 2023)

Keputusan banyak perempuan untuk menjadi pekerja migran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga mereka. Banyak dari mereka bekerja di luar negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, meningkatkan kondisi tempat tinggal, dan membantu perekonomian. Dalam penelitian *Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Kabupaten Lombok Timur* dijelaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan migran memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan keluarga (Rosiana dkk., 2023)

Dalam penelitian *Modal Sosial Komunitas dalam Pemberdayaan Ekonomi Purna Pekerja Migran Perempuan* dijelaskan bahwa remitansi pekerja migran perempuan berperan penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat di daerah asal (Anwar dkk., 2021; Kusuma, 2022) Selain tekanan ekonomi, migrasi tenaga kerja perempuan juga dipengaruhi oleh harapan sosial bahwa perempuan migran akan meningkatkan status ekonomi keluarga mereka. Perempuan migran sering dianggap sebagai "penyelamat ekonomi keluarga" karena mereka mampu mengirimkan uang dari luar negeri atau memberikan remitansi.

Ketergantungan ekonomi terhadap migrasi tenaga kerja perempuan dapat dilihat dari kondisi tersebut. Meskipun harus menghadapi berbagai risiko seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, diskriminasi, dan lemahnya perlindungan hukum, banyak perempuan yang memilih bekerja di luar negeri. Dari sudut pandang feminisme, situasi ini menunjukkan bahwa perempuan sering berada di bawah tekanan karena masalah ekonomi dan Ketimpangan gender dalam sistem sosial. Perempuan migran seringkali dipekerjakan sebagai tenaga kerja murah dengan perlindungan yang rendah di sektor domestik. Selain itu, fenomena migrasi pekerja perempuan menunjukkan perbedaan dalam pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia, dengan mayoritas pekerja migran berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, migrasi pekerja perempuan ke Arab Saudi didorong oleh faktor ekonomi seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya upah domestik, dan tuntutan kebutuhan keluarga.

Feminisme, Budaya Patriarki, dan Citra Inferior terhadap Pekerja Migran Perempuan

Perspektif feminisme dalam penelitian ini melihat jika perempuan sering ditempatkan pada posisi yang rentan akibat adanya ketimpangan gender dalam sistem sosial dan ekonomi global. Sistem global yang sering kali memandang perempuan sebagai kelompok subordinat kelompok yang lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam dunia internasional kondisi inilah yang perempuan rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan. Ketimpangan gender melalui perspektif feminisme tidak hanya terjadi dilingkup domestik, tetapi juga berkembang dalam sistem hubungan internasional dan pasar tenaga kerja global. Melalui *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap lemah, emosional, dan memiliki ketergantungan terhadap laki-laki sehingga perempuan sering mengalami marginalisasi dalam berbagai sektor sosial dan ekonomi (Fakih, 2013).

Posisi pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sistem patriarki sangat sering kali menghadirkan stereotip dimana harus ditempatkan pada pekerjaan di sektor domestik seperti rumah tangga karena dianggap memiliki sifat sabar, patuh, dan mudah diatur. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* menjelaskan bahwa perempuan migran sering mengalami subordinasi dalam relasi kekuasaan baik di dalam keluarga maupun lingkungan kerja akibat konstruksi budaya patriarki yang masih kuat (Sulistiyono & Wahyuni, 2012). Perbedaan upah dan jenis pekerjaan antara pekerja laki-laki dan perempuan merupakan salah satu akibat dari ketimpangan gender. Pada sektor konstruksi atau industri dengan tingkat upah dan perlindungan yang lebih tinggi lebih banyak mempekerjakan laki-laki sementara perempuan ditempatkan pada sektor domestik dengan jam kerja yang tinggi, namun upah yang didapat lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan diskriminasi gender dalam sistem ketenagakerjaan, di mana posisi yang ditempatkan oleh perempuan seringkali dipandang memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan posisi yang ditempatkan oleh laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga menghadapi ketidakadilan gender yang membuat mereka lebih rentan dalam sistem migrasi tenaga kerja internasional.

Media juga turut andil dalam membentuk citra inferior terhadap pekerja migran di masyarakat. Media sangat memengaruhi opini publik tentang pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi. Dalam penelitian *Citra Inferioritas Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Saluran Berita Sabq.Org Saudi Arabia* dijelaskan bahwa pekerja migran perempuan Indonesia sering digambarkan sebagai kelompok yang lemah, tidak berpendidikan, dan identik dengan masalah sosial (Aini, 2014). Secara tidak langsung representasi tersebut membuat stereotip negatif mengenai perempuan migran Indonesia. Media lebih sering menampilkan pekerja migran perempuan sebagai korban atau sumber masalah sosial dibanding sebagai individu yang memiliki kontribusi ekonomi besar bagi keluarga dan negara.

Pekerja migran perempuan seringkali dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah di negara tujuan mereka karena citra negatif di media. Situasi ini meningkatkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran perempuan di tempat kerja mereka. Selain menghadapi ancaman fisik dan ekonomi, pekerja migran perempuan juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis akibat meningkatnya stigma terhadap mereka di masyarakat. Oleh karena itu, para feminis percaya bahwa budaya patriarki dan representasi media secara signifikan berkontribusi pada pembentukan ketidaksetaraan gender bagi pekerja migran perempuan Indonesia di Arab Saudi.

Ancaman Keamanan dan Kerentanan Hukum dalam Perspektif *Human Security*

Keamanan dalam perspektif *human security* tidak hanya terkait dengan perlindungan negara dari ancaman militer, tetapi juga mencakup perlindungan individu dari ancaman fisik, ekonomi, sosial, politik, serta psikologis. Dalam menganalisis kondisi tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi konsep *human security* ini sangat relevan, dikarenakan sering dihadapkan dengan berbagai bentuk ancaman keamanan non-tradisional. Banyak pekerja migran perempuan mengalami kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi, pelecehan seksual, hingga pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja di sektor domestik. Berdasarkan penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri* dijelaskan bahwa pekerja migran perempuan merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia akibat lemahnya perlindungan hukum serta minimnya pengawasan terhadap sektor domestik di negara tujuan (Hamdi, 2021) Dengan demikian, banyak kasus kekerasan sulit diketahui dan jarang mendapatkan penanganan hukum yang memadai.

Lemahnya perlindungan hukum di negara tujuan memperparah kerentanan bagi pekerja migran perempuan. Minimnya pengetahuan hukum, ketergantungan terhadap majikan, serta keterbatasan bahasa, menyebabkan banyak pekerja migran yang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses bantuan hukum. Arab Saudi memiliki sebuah sistem kerja yang disebut *kafala* berpengaruh dalam memperbesar relasi kuasa yang tidak seimbang karena status tinggal dan pekerjaan pekerja migran berada di bawah kendali pemberi kerja. Dalam beberapa kasus, pekerja migran perempuan tidak memiliki kemampuan untuk berpindah atau meninggalkan tempat kerja tanpa izin majikan, yang meningkatkan kemungkinan eksploitasi dan kekerasan di tempat kerja mereka. Selain itu, pelanggaran hak pekerja lebih sering terjadi di sektor domestik karena kurangnya pengawasan ketat dari negara. Penelitian *Diplomasi Indonesia dan Perlindungan Pekerja Migran di Arab Saudi, 1975–1986* menjelaskan bahwa pekerja migran perempuan rentan mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, penipuan, hingga perdagangan manusia akibat lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran di Arab Saudi (Ishak, 2025)

Keamanan individu menjadi prioritas utama dari perspektif keamanan manusia karena ancaman terhadap manusia tidak hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga dari kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam buku *Human Security dalam Hubungan Internasional* dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat berupa ancaman terhadap *personal security* melalui kekerasan fisik maupun nonfisik akibat ketidakadilan sosial dan budaya patriarki yang mengakar (Kusuma, 2022). Ancaman keamanan yang dialami oleh para tenaga kerja wanita Indonesia di Arab Saudi, jika dikaitkan ancaman yang mereka hadapi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak dan keselamatan individu masih sangat lemah. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi dan migrasi internasional, tetapi juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan individu dalam studi hubungan internasional.

Peran Negara dalam Perlindungan Pekerja Migran Perempuan

Memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan merupakan peran penting negara, khususnya dalam menjamin keamanan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan pekerja di luar negeri. Peran negara dalam perspektif *human security* tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan wilayah tetapi juga melindungi keselamatan individu dari berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, ada tanggung jawab besar bagi pemerintah Indonesia

untuk memastikan bahwa pekerja migran perempuan memperoleh perlindungan hukum sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Perlindungan ini penting karena pekerja migran perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi di negara tujuan.

Berbagai upaya pemerintah Indonesia telah dilakukan dalam memberi perlindungan terhadap pekerja migran melalui kebijakan, diplomasi, serta kerja sama bilateral dengan negara tujuan seperti Arab Saudi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah untuk mengawasi penyedia tenaga kerja dan memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran sebelum diberangkatkan. . Dalam penelitian *Diplomasi Indonesia dan Perlindungan Pekerja Migran di Arab Saudi, 1975–1986* dijelaskan bahwa diplomasi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah Indonesia dalam menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hak pekerja migran di Arab Saudi (Ishak, 2025).

Perlindungan pekerja migran perempuan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini karena kurangnya koordinasi, keterbatasan akses ke bantuan hukum, dan perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Arab Saudi, banyak kasus eksploitasi dan kekerasan yang lambat ditangani. Selain itu, karena mereka bekerja di ruang pribadi rumah tangga, pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor domestik seringkali sulit dijangkau pengawasan. Meskipun beberapa kebijakan perlindungan telah dibuat, banyak pekerja migran perempuan masih berada dalam posisi yang rentan karena kondisi ini. Akibatnya, untuk meningkatkan keamanan dan hak pekerja migran perempuan, negara harus meningkatkan diplomasi internasional, meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pekerja migran, meningkatkan akses ke bantuan hukum, dan bekerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Globalisasi saat ini merupakan fenomena yang menciptakan berbagai kemudahan, seperti migrasi pekerja perempuan Indonesia ke Arab Saudi. Hal ini dikarenakan kemudahan mobilitas tenaga kerja internasional, serta faktor ekonomi yang mendorong perempuan mencari peluang kerja di luar negeri. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, dan tuntutan ekonomi keluarga menjadi faktor utama meningkatnya migrasi pekerja perempuan Indonesia. Di sisi lain, tingginya kebutuhan tenaga kerja domestik di Arab Saudi menjadi faktor penarik yang memperkuat arus migrasi tersebut.

Perspektif feminisme memandang, akibat adanya budaya patriaki, ketimpangan gender, serta konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada kelompok subordinat, sehingga pekerja migran perempuan berada pada posisi yang rentan. Citra inferior yang berkembang melalui media dan stereotip sosial memperkuat kerentanan terhadap pekerja migran perempuan. Akibatnya, pekerja migran perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam perspektif *human security* pekerja migran perempuan tidak hanya rentan dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan individu, sosial, hukum, dan psikologis. Pekerja migran perempuan sangat rentan di Arab Saudi karena kurangnya perlindungan hukum, ketergantungan pada majikan, dan kurangnya pengawasan sektor domestik. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran melalui kebijakan, diplomasi, dan kerja sama internasional yang berfokus pada hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pekerja migran perempuan tidak hanya

dipahami sebagai isu migrasi tenaga kerja, namun juga sebagai persoalan ketimpangan gender dan *human security* dalam studi hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2014). *Citra inferioritas tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di saluran berita Sabq.Org Saudi Arabia. Muadalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(2).
- Anwar, M. Z., Wibowo, A., & Haryono, B. (2021). *Modal sosial komunitas dalam pemberdayaan ekonomi purna pekerja migran perempuan. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 2(1), 1–18.
- Dewi, F. K., & Kosandi, M. (2025). *Protection of female migrant workers: An analysis of power hegemony between Indonesia and Saudi Arabia. DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 23(1). <https://doi.org/10.30996/dia.v23i01.10972>
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fikriansyah, Z., & Julia, A. (2023). *Faktor penentu keputusan masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)*, 3(1), 25–32.
- Hamdi, S. (2021). *Tantangan migrasi, pengelolaan remitansi, dan kekerasan terhadap buruh migran perempuan asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22–44.
- Ishak, A. M. (2025). *Diplomasi Indonesia dan perlindungan pekerja migran di Arab Saudi, 1975–1986. Forum for Social and Humanities Studies*, 1(2), 54–66.
- Kusuma, A. S. (2022). *Human security dalam hubungan internasional*. CV. Pena Persada.
- Rosiana, E., Puspitawati, H., & Krisnatuti, D. (2023). *Faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga pekerja migran perempuan di Kabupaten Lombok Timur: Women's economic contribution, family interaction, social support, and family welfare of women migrant workers. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 16(2), 95–107. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95>
- Sulistiyo, B., & Wahyuni, E. S. (2012). *Migrasi tenaga kerja perempuan dan perubahan sosial pedesaan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2).
- Tempo. (2025, Mei 5). *Indonesia peringkat pertama tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN 2025*. Tempo.co. [Tempo.co](https://www.tempo.co)